

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sejarah dunia mencatat bahwa negara Amerika Serikat terlibat dalam operasi militer di negara Irak adalah karena pertama untuk memusnahkan senjata pemusnah massal di Negara Irak, kedua menghapus ancaman dari sisa - sisa bekas rezim Saddam Husein di negara Irak dan yang ketiga adalah memerangi kelompok teroris seperti Al - Qaeda yang dapat berdampak negatif dan buruk terhadap stabilitas di negara Irak (House 2002).

Pada tahun 2003 negara Amerika Serikat melakukan invasi ke negara Irak yang pada akhirnya berdampak ke bidang ekonomi dan militer yang menghabiskan banyak dana serta memakan banyak korban. Tercatat pada tahun 2003, invasi ini telah merenggut sebanyak 4.487 nyawa korban prajurit Amerika Serikat, lebih dari 100.000 warga Irak meninggal, dan menelan biaya sebesar 3 triliun dollar Amerika Serikat untuk membayar biaya perang dan rekonstruksi. Namun di tahun 2004 kekerasan di Irak masih terus terjadi oleh milisi dan pendukung bekas rezim mantan presiden Irak Saddam Hussein pasca invasi Amerika Serikat. Di tahun 2005 maka dibentuk koalisi keamanan yaitu Pasukan Multi Nasional Irak oleh Amerika Serikat dan koalisinya dan juga pada tahun ini juga diadakan pemilihan umum di Irak, lalu pada tahun 2006 terbentuk negara Irak (Muson, 2015).

Akhirnya pada tahun 2007 Amerika Serikat dan Irak bekerja sama melalui pasukan militer mereka. Dengan terjalinnya kesepakatan Hubungan Kerjasama bagi kedua negara akhirnya pada tahun 2007 kedua negara resmi menandatangani Deklarasi Prinsip Jangka Panjang untuk Hubungan Kerjasama dan Persahabatan antara Republik Irak dan Amerika Serikat (Agreement Between the United State of America and the Republic of Iraq On the Withdrawal of United State Forces from Iraq and the Organization of Their Activities during Their Temporary Presence in Iraq, 2008)

Kondisi kekacauan konflik di Irak terlihat dari pada pergolakan politik di Irak yaitu pada pemimpin dan para pendukungnya yaitu pada masa pemerintahan rezim Jalal Tabani di Irak. Pendukung yang berasal dari golongan dalam agama Islam yaitu sunni dan syiah yang memiliki perbedaan pandangan dan cara berpikir yang berbeda tentang agama Islam. Konflik yang terjadi di negara Irak mengenai konflik sektarian ini dapat memicu perpecahan di dalam negara Irak itu sendiri. Dibalik faktor terjadinya konflik sehingga yang menyebabkan terbentuknya kelompok separatis bahkan kelompok teroris di negara Irak adalah karena pemahaman agama yang sempit dan kurang mendalam sehingga dimanipulasi oleh berbagai kelompok – kelompok di Negara tersebut seperti kelompok sektarian, ekstremis, fundamentalis, kelompok radikal menjadi sebuah kelompok teroris. Sehingga kelompok - kelompok tersebut membuat konflik serta kekerasan terus terjadi di dalam negara tersebut. Pada akhirnya negara seperti negara Irak ini membutuhkan membina hubungan kerjasama kenegaraan melalui kerjasama militer dengan Amerika Serikat (Dodge, 2013).

Perjanjian Keamanan dan Persetujuan Kerangka Kerja Strategis dibentuk adalah sebagai hasil yang sumbernya berdasarkan dari kerangka acuan dasar dalam pengembangan hubungan Kerjasama antara Amerika Serikat dan Irak. Perjanjian Keamanan dan Kerangka Kerja Strategis ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009, dengan pertukaran nota diplomatik antara Amerika Serikat dan Irak. Dalam Perjanjian keamanan tersebut, pihak otoritas Amerika Serikat mempunyai peran aktif melalui tindakan militernya dengan membela negara yang terlibat dalam sesuai isi perjanjian tersebut. Perjanjian ini pun telah diratifikasi dalam sebuah kerangka perjanjian keamanan yang utuh (USF-IRAQ, 2008).

Pada tanggal 31 Agustus 2010, melalui Perjanjian Keamanan bilateral yang dilakukan oleh kedua negara yaitu Amerika Serikat dan Irak. Presiden Barack Obama menyampaikan bahwa akan mengakhiri operasi tempur di negara Irak dan segera menyelesaikan penarikan pasukan militer Amerika Serikat dan melakukan transisi kekuatan militer Amerika Serikat. Lebih dari 50.000 tentara negara Amerika Serikat akan ditugaskan untuk menasihati, membantu pasukan keamanan Irak serta memperlengkapi pasukan keamanan Irak dan akan resmi menarik diri

pada akhir tahun 2011 sesuai dengan persyaratan Perjanjian Keamanan (Cogan, 2008).

Dengan diakhirinya Operasi militer Amerika Serikat di Irak setelah invasi Amerika Serikat di Irak pada tahun 2003 dan dengan ini juga dibuat perjanjian keamanan mengenai kerjasama pasukan militer antar negara – negara yaitu tentang Kerjasama pasukan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Irak melalui Status Of Force Agreement ini pada tahun 2009 sampai tahun 2012 (Agreement Between the United State of America and the Republic of Iraq On the Withdrawal of United State Forces from Iraq and the Organization of Their Activities during Their Temporary Presence in Iraq, 2008).

I.2 Rumusan Permasalahan

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa yang menjadi pertanyaan penelitian adalah : **Bagaimana Implementasi Status Of Force Agreement (SOFA) Dalam Menghadapi Konflik dan Kekerasan Politik di Irak Periode 2009 - 2012 ?**

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Memahami implementasi perjanjian *Status Of Force Agreement* (SOFA) dalam menghadapi konflik dan kekerasan politik di Negara Irak.
- b. Menjelaskan gambaran mengenai perjanjian *Status Of Force Agreement* (SOFA) dari awal terbentuknya dan perkembangannya.
- c. Menganalisa kerjasama SOFA yang dilakukan Amerika Serikat dan Irak dalam menghadapi konflik dan kekerasan politik di Negara Irak.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Akademis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk meberikan informasi maupun data dalam studi Hubungan Internasional yang memiliki keterkaitan dengan kerjasama keamanan.

- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan maupun referensi untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan kerjasama keamanan.

I.5 Tinjauan Pustaka

Beberapa ahli telah membuat penelitian buku maupun jurnal yang berhubungan dengan permasalahan kerjasama SOFA antara Amerika Serikat dan Irak dalam menghadapi konflik dan kekerasan politik.

- a. Better planning for Defense to State transition in Iraq needed to avoid mistakes and waste

Dalam jurnal laporan dari Commission on wartime Contracting Afghanistan and Iraq, yang berjudul "*Better planning for Defense-to-State transition in Iraq needed to avoid mistakes and waste*" Amerika Serikat - Irak Status of Forces Agreement yang mengatur tanggal akhir tahun 2011 untuk keluar dari pasukan militer Amerika Serikat telah ditandatangani pada tanggal 17 November 2008, dan cepat diratifikasi oleh parlemen Irak dan dewan kepresidenan. Pada tanggal 27 Februari 2009, dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengumumkan bahwa kehadiran militer Amerika Serikat di Irak akan dikurangi menjadi tidak lebih dari 50.000 tentara pada akhir Agustus 2010, dengan total pull-out militer 31 Desember 2011 (Durso, 2011). Rencana negara Irak saat ini adalah dengan "Enduring Presence Posts" atau EPP menempatkan pangkalan militer Amerika Serikat saat ini di Basrah, Diyala, Erbil, Kirkuk, dan Ninewa. APP ini akan menggantikan 22 Tim Rekonstruksi Provinsi yang saat ini beroperasi di Irak dengan dukungan militer Amerika Serikat. Pejabat negara telah memberitahu staf Komisi bahwa situs pangkalan militer tambahan mungkin diperlukan, menaikkan tingkat dukungan yang dibutuhkan (Durso, 2011). Sumber daya Diplomatik dalam Layanan Keamanan Negara adalah tidak memadai untuk tantangan ekstrim di Irak, menurut April 7, 2010, surat kepada Petugas di akuisisi di pimpin Dephan dari Ambassador Patrick Kennedy, Sekretaris Negara untuk Manajemen (Durso, 2011).

Sebagai pasukan militer Amerika Serikat meninggalkan Irak dengan membawa beberapa layanan jauh di atas target yang keluar akhir 31 Desember 2011. Negara akan memiliki alternatif yang praktis untuk memenuhi keamanan dan dukungan yang berkelanjutan demi untuk kebutuhan di Irak daripada dengan meningkatkan kontraknya (Durso, 2011).

b. Jurnal *Last US Combat Brigade Leaves In Iraq*

Di Jurnal "*Last US Combat Brigade Leaves In Iraq*" saat masa transisi Irak, sekitar 50.000 tentara Amerika Serikat akan tetap berada di negara itu dalam kapasitasnya sebagai penasihat, membantu melatih pasukan Irak dalam misi baru yang diberi nama sandi Operasi New Dawn, yang akan berlangsung hingga akhir tahun 2011. Banyak orang Irak memiliki perasaan campur aduk tentang penarikan pasukan takut kekerasan lebih lanjut (Last US Combat Brigade Leaves In Iraq, 2010). Pada saat masa Militer Irak menggunakan peralatan Amerika Serikat, yang berarti pasukan keamanan akan membutuhkan pelatih, teknisi dan hubungan dengan kompleks industri militer dalam tahun-tahun mendatang. Al-Qaeda dan sekutu mereka mencoba untuk menggunakan situasi ketidakstabilan politik Irak untuk melancarkan serangan terhadap pasukan keamanan, hanya untuk mengirim pesan bahwa jika Amerika melakukan penarikan pasukannya, pasukan militer Irak tidak akan mampu melindungi rakyatnya (Last US Combat Brigade Leaves In Iraq, 2010). Kekhawatiran telah dikemukakan bahwa Amerika Serikat menarik diri dari negara itu terlalu cepat, terutama oleh Letnan Jenderal Babaker Zebari, perwira tentara yang paling senior Irak, yang memperingatkan bahwa pasukan Irak ini tidak akan siap untuk mengambil kendali keamanan sampai 2020. Zebari memperkirakan bahwa "masalah akan dimulai setelah 2011", mengacu pada batas waktu pemerintahan Obama untuk penarikan penuh pasukan AS dari Irak (Last US Combat Brigade Leaves In Iraq, 2010).

c. Status of Forces Agreement (SOFA): What Is It, and How Has It Been Utilized?

Berdasarkan laporan dari *csr Report* bahwa diketahui SOFA adalah perjanjian multilateral atau bilateral yang umumnya membangun kerangka di mana Amerika Serikat personil militer beroperasi di negara asing dan bagaimana hukum domestik yurisdiksi asing berlaku terhadap personil Amerika Serikat di negara itu Amerika Serikat Amerika Serikat (Mason, 2012). Persyaratan formal mengenai bentuk, isi, panjang, atau judul SOFA sebuah tidak ada. SOFA dapat ditulis untuk tujuan atau kegiatan tertentu, atau mungkin mengantisipasi hubungan jangka panjang dan menyediakan fleksibilitas maksimum dan penerapannya. Hal ini umumnya dokumen yang berdiri sendiri disimpulkan sebagai kesepakatan eksekutif. Sebuah SOFA dapat mencakup banyak ketentuan, tapi yang paling masalah umum dibahas adalah negara yang dapat melaksanakan yurisdiksi pidana lebih personel Amerika Serikat. Ketentuan lain yang dapat ditemukan di sebuah SOFA termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pemakaian seragam, pajak dan biaya, membawa senjata, penggunaan frekuensi radio, lisensi, dan adat istiadat peraturan (Mason, 2012). SOFA sering disertakan, bersama dengan jenis lain dari perjanjian militer, sebagai bagian dari pengaturan keamanan yang komprehensif dengan negara tertentu. Sebuah SOFA sendiri bukan merupakan pengaturan keamanan; melainkan menetapkan hak dan hak istimewa dari personel Amerika Serikat hadir dalam negara dalam mendukung penataan keamanan yang lebih besar. SOFA dapat dimasukkan berdasarkan otoritas ditemukan dalam perjanjian sebelumnya dan tindakan kongres atau perjanjian eksekutif tunggal (Mason, 2012). Amerika saat ini pihak lebih dari 100 perjanjian yang dapat dianggap SOFA. Daftar perjanjian saat ini termasuk di akhir laporan ini dikategorikan dalam tabel menurut mendasari sumber otoritas, jika ada, untuk masing-masing SOFA (Mason, 2012).

d. State and society in Iraq ten years after regime change: the rise of a new authoritarianism

Di buku "*State and society in Iraq ten years after regime change: the rise of a new authoritarianism*" dibuat oleh Toby Dodge terpilihnya Perdana Menteri Irak pada pemilu Irak tahun 2009 yang merupakan dukungan dari Amerika Serikat melalui perjanjian Status of Force Agreement mampu membuat kebijakan hukum bermaksud untuk menghentikan konflik (Dodge, 2013). Pada tahun 2011, sekitar \$ 24.490.000.000 USD dana yang telah dihabiskan dalam upaya untuk membangun kembali angkatan bersenjata. Pada bulan Januari 2012, pasukan keamanan Irak mempekerjakan total 933.103 orang yang tersebar di Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan Angkatan Anti-Terrorisme Perdana Menteri (Dodge, 2013). Fakta bahwa kekuatan ini terutama dirancang untuk menegakkan ketertiban di masyarakat Irak sendiri, bukan untuk melindungi negara dari agresi. Ukuran dan kapasitas angkatan bersenjata Irak, dikombinasikan dengan kurangnya pengawasan demokratis yang mereka tunduk, mencerminkan fungsinya sebagai alat Berkendara Nouri al-Maliki terhadap otoritarianisme kompetitif. Perdana Menteri, melalui Kantor Panglima, proliferasi operasi pusat dan penggunaan dari Irak Pasukan Operasi Khusus, memiliki kapasitas koersif baik untuk menyerang terhadap lawan politiknya, seperti yang dilakukan pada bulan Desember 2011 dan 2012, dan untuk memobilisasi gerakan protes populer, seperti yang ia lakukan pada bulan Februari 2011 dan lagi pada Januari 2013 (Dodge, 2013). Pada saat pasukan tempur Amerika Serikat meninggalkan Irak pada akhir tahun 2011, 4487 personil militer Amerika Serikat telah meninggal dan menurut Iraq Body Count memperkirakan bahwa antara 110.110 dan 120.293 warga sipil Irak tewas kematian akibat kekerasan antara invasi dan November 2012. Oleh karena itu pada September 2012, sebanyak \$ 212,32 miliar dana dari Amerika Serikat dan dari pemerintah Irak sendiri telah dialokasikan untuk rekonstruksi pasca perang di Irak (Dodge, 2013).

I.6 Kerangka Teori

a. Teori Kerjasama Internasional

Teori kerjasama internasional sebagai dasar dari kebutuhan akan pengertian tentang kesepakatan bersama mengenai pembangunan politik dimana kebutuhan itu menjadi teramat penting bagi suatu Negara di lingkup dunia. Menjadi suatu hal yang penting untuk memenuhi kepentingan suatu Negara tersebut untuk melakukan kerjasama internasional dalam tatanan internasional dimana perilaku isu mulai muncul berkembang dan beragam. Melalui multilateralisme dari organisasi internasional, rezim internasional, dan aktor internasional meletakkan konsep kerjasama internasional tersebut.

Suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor:

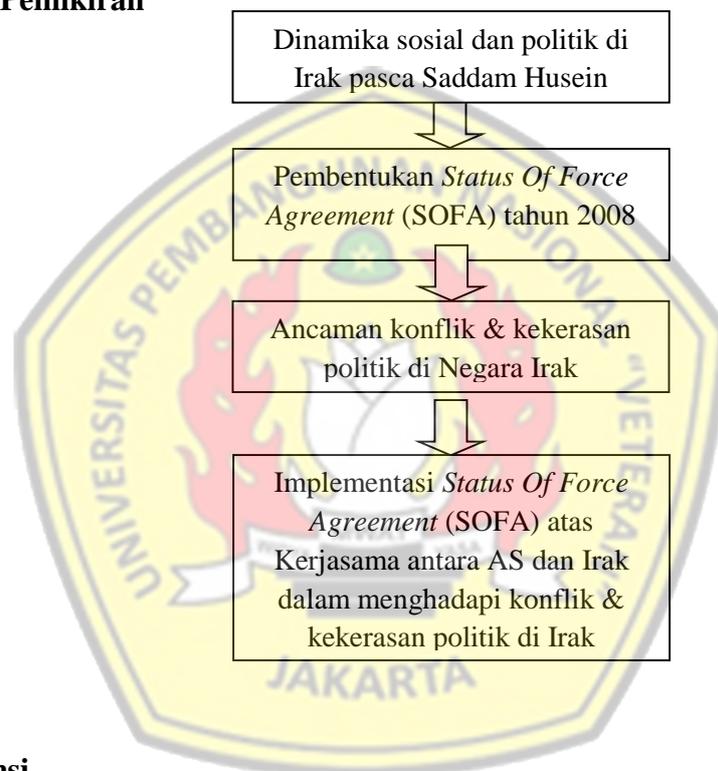
- 1) Kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.
- 2) Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-bangsa.
- 3) Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.
- 4) Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi (Dawson, 2015).

b. Konsep Comprehensive Security

Suatu negara tidak dapat berdiri dan berjalan sendiri tanpa ada bantuan dari Negara lain. Dilihat dari konteks keamanan dari Barry Buzan keamanan harus dipahami tidak hanya dilihat dari faktor keamanan militer saja tetapi juga mementingkan faktor – faktor politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan (Muladi 2012, hlm.) Dalam konsep comprehensive security terdapat instrumen di dalamnya yaitu

Human Security : aktor di dalam negara yaitu masyarakat disini menjadi pemain penting dalam negara. Masyarakat menjadi faktor utama yang penting untuk dilindungi melalui negara. Apabila dalam suatu negara tidak dapat melindungi masyarakat serta warga negaranya, maka negara tersebut dianggap gagal dalam melindungi warga negaranya. Maka masyarakat internasional maupun negara lain dapat membantu untuk melindungi negara yang gagal itu (Muladi 2012, hlm.)

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

- a. Dinamika konflik terjadi di negara Irak menimbulkan kecemasan bagi negara-negara internasional dan negara timur tengah lainnya khususnya Amerika Serikat dan Irak.
- b. Dalam menghadapi ancaman kelompok sektarian di negaranya, Irak sepakat untuk membuat perjanjian dengan Amerika Serikat melalui *Status Of Force Agreement* (SOFA).
- c. *Status Of Force Agreement* (SOFA) merupakan perjanjian berisi tentang pengaturan status pasukan militer suatu negara di negara lain. Pengaturan

ini disepakati kedua negara dengan beberapa faktor yaitu faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan hukum.

I.9 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan salah satu langkah yang digunakan dalam penulisan ilmiah. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan, memahami, dan menganalisa isu atau fenomena yang diangkat. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu meliputi data - data yang bersumber dari buku-buku, surat kabar dan juga internet untuk diolah. Data - data tersebut akan penulis gunakan dalam penulisan ini dan penulis akan menganalisa menggunakan isu dan teori yang telah ditetapkan.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama berupa dokumen resmi. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga penulis hanya mencari dan mengumpulkan data seperti buku, jurnal, surat kabar, laporan atau tulisan orang lain, dan lembaga pengkajian yang sudah dipublikasikan serta melalui media *online*.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang diklasifikasikan dan dikumpulkan dari sejumlah literature. Data tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data – data primer di dapat dari website resmi *FCNL* dan *BBC News*. Data – data sekunder di dapat dari situs resmi *Congressional Research Service, The White House, Security Council*.

d. Teknik Analisa Data

Data – data yang didapat dikelola untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk mendukung jawaban dari pertanyaan penelitian. Data – data tersebut kemudian dikaji secara mendalam dengan menggambarkan menganalisa dan menjelaskan suatu isu yang diangkat.

I.10 Sistematika Penulisan

Dibawah ini merupakan sistematika penulisan yang akan penulis gunakan dalam menganalisa permasalahan yang ada pada penelitian:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, asumsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II DINAMIKA SOSIAL POLITIK IRAK PASCA REZIM SADDAM HUSEIN

Bab kedua akan membahas mengenai pergolakan dan perebutan kekuasaan pada masa pemerintahan Jalal Tabani antara golongan sunni dan syiah di Irak serta ancaman yang terjadi yang dilakukan oleh para pendukung – pendukung dari pemimpin yang berbeda golongan dan pemahaman yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya konflik dan kekerasan politik menjadi berkecamuk di negara Irak.

BAB III IMPLEMENTASI SOFA ATAS KERJASAMA AMERIKA SERIKAT DAN IRAK

Bab ketiga akan membahas mengenai implementasi *Status of Force Agreement* (SOFA) dalam kerjasama Amerika Serikat dengan Irak dan upaya untuk menghadapi konflik dan kekerasan politik akibat ancaman kelompok sektarian dan dampak yang terjadi bagi kedua negara dan keuntungan yang didapat Amerika Serikat dan Irak dengan melakukan kerjasama dalam *Status of Force Agreement* (SOFA) periode 2009 - 2012.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran

